

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan UMKM di Indonesia dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Dengan membantu Pemerintahan mengurangi pengangguran berarti para pelaku UMKM telah membantu pemerintahan sehingga mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terlihat cukup besar di perekonomian nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan sejak sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi diluncurkan pemerintah pada 2015 lalu, sudah ada 13,8 juta pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) menikmati fasilitas untuk mengembangkan usaha mereka. Total akumulasi plafon KUR yang dinikmati 13,8 juta pelaku usaha mencapai Rp333 triliun. Dari total KUR tersebut, Rp120,35 triliun di antaranya disalurkan pada 2018 kemarin. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kualitas penyaluran KUR pada kurun waktu tersebut cukup baik (www.cnnindonesia.com).

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM (2019), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia adalah sebesar 36,82 persen. Selain itu, UMKM juga membantu penyerapan tenaga kerja domestik dengan

kontribusi yang meningkat dari 98,7 persen menjadi 89,17 persen (www.cnnindonesia.com). Berdasarkan data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) menyatakan bahwa sektor industri kuliner memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyumbang 30 persen dari total pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia (www.entrepreneur.wartaekonomi.co.id).

Kepala dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Zirma Yusri, di Sumbar (2019) terdapat banyak potensi UMKM yang dikembangkan jumlah UMKM yang ada sebanyak 593.000 terdiri dari Mikro sebanyak 531.350 pelaku usaha kecil sebanyak 53.431 pelaku usaha menengah sebanyak 7.990 atau 1,33 persen dan untuk pelaku usaha besar sebanyak 419.000 (www.repuplika.co.id).

Pemerintah Kota Padang berharap ada lebih banyak dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan khususnya syariaiah, terhadap pertumbuhan UMKM. Walikota Padang menuturkan pihaknya hanya memiliki anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk mengembangkan lebih dari 80.000 pelaku UMKM di Padang (www.bisnis.com).

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terdapat jumlah UMKM tahun 2016 sebesar 2.056 dan pada tahun 2017 sebesar 2.953 mengalami kenaikan. Pertumbuhan UMKM di Kota Padang diupayakan dengan melakukan pelatihan di 11 Kecamatan Agar pemerintah dapat memantau secara merata potensi yang dimiliki masing-masing UMKM diberbagai Kecamatan yang difokuskan adalah Kecamatan Lubuk Begalung. Sebagaimana di jelaskan pada tabel yang ada di bawah ini.

TABEL 1.1
REKAPITULASI DATA ENTREPRENEUR (WIRAUSAHA BARU)
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG TAHUN 2015-2018

Tahun	Kecamatan	JENIS USAHA											Total
		Kuliner	IMR	IKT	Waserda	Jasa	PKL	Per-tanian	Per-kebunan	Perika-nan	Peter-nakan	Nelayan	
2015	Lubuk Begalung	39	45	27	114	61	6	0	0	6	2	0	300
2016	Lubuk Begalung	64	70	27	168	70	6	1	0	8	1	5	420
2017	Lubuk Begalung	50	28	20	86	35	1	0	0	0	1	0	221
2018	Lubuk Begalung	73	56	27	217	79	4	0	0	3	2	0	461

(Sumber. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 4 tahun terakhir (diolah))

Dari data diatas dapat juga dilihat dari jumlah UMKM perkembangan pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan. Dan terjadi penurunan yang signifikan yaitu antara tahun 2017 Penurunan itu disebabkan oleh ketidak mampuan manajemen dalam mengelola usahanya. Keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan pemilik dalam menghadapi lingkungan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan total UMKM yang mengalami kenaikan cukup drastis berfokus pada usaha kuliner. Kenaikan tersebut diakibat ada gojek yang dapat membantu usaha kuliner dengan layanan gofood dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM. Melalui kegiatan pembekalan, binaan Dinas Perhubungan Pemko Padang yang bergabung menjadi mitra Go-food menjalankan bisnis mereka secara digital (www.m.klikpositif.com).

Adanya dukungan dari Pemerintah dapat membantu para UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Dari jenis usaha yang dominan di Kecamatan Lubuk Begalung tersebut yang jadi perhatian adalah usaha kuliner. Usaha kuliner juga merupakan usaha yang pertumbuhannya sangat cepat adanya ide-ide kreatif dari para

pedagang menciptakan inovasi makanan yang unik sebagai tren kuliner dan juga gaya hidup milenial pada masyarakat kalangan remaja. Lingkup kuliner tidak terbatas dapat dilihat dari restoran atau kafe yang jumlahnya semakin bertambah. Untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksinya Pemerintah juga ikut serta dalam membantu pemberian sertifikasi produk halal. Bertujuan untuk memberikan keamanan serta kepastiaan produk kepada masyarakat dalam mengosumsinya.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik penerapan sertifikasi halal untuk produk. Kewajiban halal mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019 dengan masa transisi selama 5 tahun. Ketua Komite Pembinaan dan Pengembangan UKM Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Irwan s Widjaja mengatakan sejauh ini tidak ada penolakan dari UKM produk makanan dan minuman terkait pemberlakuan wajib halal. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai amanat Undang-Undnag Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 67 ayat 1 UU JPH (www.liputan6.com). Akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan daya saing bagi konsumen yang beragama muslim daerah salah satu yang menjadi perhatian mengenai kuliner adalah Sumatera Barat.

Bidang kuliner di Sumatera Barat sebanyak 22 rumah makan dan restoran telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Sumbar Doni Mengatakan, pada tahun 2017 ada 14 rumah makan dan restoran yang

memiliki sertifikat halal, kemudian bertambah 8 lagi di tahun 2018. Tahun 2019 ditargetkan ada 25 rumah makan dan restoran bersertifikat halal (www.kompas.com). Pemerintah juga ikut serta dalam mengawasi nama-nama produk usaha yang tidak sesuai dengan standar mutu dan memberikan peringatan apabila ada yang menggunakannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menyatakan haram untuk menggunakan kata-kata neraka, setan, iblis untuk digunakan sebagai nama produk makanan, minuman dan lainnya. Pelabelan menyangkut hal-hal yang prinsip di dalam islam yaitu Manhiy 'Anhu. Keputusan bidang fatwa itu diambil melalui Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumber dan MUI Kabupaten/Kota pada 20 Juli 2019. Beberapa nama produk makanan dan minuman juga mengandung nama yang cenderung berbau seksi. Imbauan juga diberikan kepada LPPOM MUI untuk tidak menerbitkan sertifikat halal terhadap produk yang menggunakan nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat (www.cnn.indonesia). Adanya pelaku usaha-usaha baru berdampak terhadap perekonomian di wilayah tersebut.

Menurut (Oktaresa, 2019) kemunculan UMKM yang membuktikan eksistensinya di perekonomian Indonesia berawal pada saat krisis moneter. Dampak dari krisis terhadap kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat terasa hampir diseluruh Negara. Kenaikan kemiskinan bergantung pada GDP *rill*. *World Bank* memprediksi penurunan GDP sebesar 12% dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan hingga 40%. Namun kemiskinan ini akan sangat bervariasi pada tiap-tiap daerah karena bergantung pada sektor apa yang berpengaruh pada daerah tersebut.

Pemerintah juga ikut serta dalam pendanaan UMKM dengan memberikan subsidi terhadap bunga pinjaman yang relatif kecil. Pendanaan yang baik akan berdampak terhadap perkembangan kinerja pada UMKM.

Menurut (Mustofa & Iramani, 2019) kinerja UKM yang baik tidak lepas dari kemampuan pengelola UKM. Kemampuan yang dimiliki pengelola UMKM seperti kemampuan yang dimiliki pengelola UKM seperti pengetahuan keuangan atau *financial literacy* sangat diperlukan. Literasi keuangan dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan.

Menurut (Wahyudiati dan Isroah, 2018) aspek keuangan merupakan aspek yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan, dan aliran kas, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya sebuah usaha. Dari perspektif keuangan, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan bagaimana sebuah unit usaha mencari sumber dana dan bagaimana mengalokasikan dana pada akhirnya dapat meningkatkan nilai usahanya dan mensejahterakan pemiliknya. Penelitian ini didukung oleh Subroto, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa aspek keuangan dan aspek SDM berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM.

Menurut Prakoso, dkk (2019) ukuran usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan memilik total asset, berapa jumlah karyawan yang diperkerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ukuran usaha akan mempengaruhi pemilik usaha untuk menentukan langkah dalam memutuskan untuk menggunakan akuntansi. Semakin besar ukuran usaha akan memberikan dampak lebih kompleks bagi usaha

untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam operasional. Menurut (Asrori dan Charisma, 2019) semakin besar ukuran usaha berimplikasi usaha tersebut memiliki sumber daya yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu untuk membayar pekerja untuk melakukan pencatatan usahanya. Penelitian ini didukung oleh (Darlis & Yatmi, 2018) *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Menurut Aini, dkk (2019) sumber daya manusia dalam usaha kecil dan menengah berperan sangat penting, karena maju tidaknya usaha juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah, banyak faktor yang mempengaruhi selain pendidikan, kurangnya pelatihan juga berpengaruh pada keahlian yang dimiliki sumber daya manusia (karyawan). Perlunya kegiatan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Penelitian ini didukung oleh Rapih, dkk (2015) terdapat pengaruh positif signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja UMKM.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan asset terpenting di dalam UMKM dengan adanya kompetensi perusahaan dapat menentukan pengetahuan dan keahlian seseorang dalam menempatkan posisi kerja yang sesuai agar karyawan dapat bertanggung jawab dengan menghadapi masalah untuk pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini didukung oleh Pramaishella, dkk (2018) terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja UMKM.

Menurut (Saputra dan Anggiriawan, 2018) sumber daya manusia dalam usaha mikro, baik pemilik ataupun karyawan perlu memiliki pengetahuan yang memadai

terkait unit bisnis yang digeluti. Misalnya dalam hal operasional, pengelolaan sumber daya, pemasaran, serta hal lainnya yang berkaitan dengan manajerial. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan, namun tidak terlalu penting jika tidak didukung oleh sebuah sistem yang jelas. Penelitian ini didukung oleh (Utami dan Desnormasari, 2018) terdapat pengaruh positif signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang jelas di kordinir oleh orang berkompeten maka akan berdampak pada peningkatan laba usaha pada laporan keuangan.

Menurut Devi, dkk (2017) kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Dalam menentukan diperlukan keahlian khusus dalam bidang akuntansi. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan haruslah memiliki kualitas karena penafsiran dari laporan keuangan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Agar kualitas pengambilan keputusan meningkat kualitatif maka informasi laporan keuangan yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Penelitian ini didukung oleh Devi, dkk (2017) terdapat pengaruh positif signifikan antara kualitas laporan keuangan terhadap ukuran usaha.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Aspek Keuangan, Ukuran Usaha dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel moderating pada UMKM di Bidang Kuliner di Kecamatan Lubuk Begalung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Keterbatasan peminjaman dana yang diboleh kan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diajukan pemilik usaha.
2. Keterbatasan modal pribadi dalam pengelolaan usaha.
3. Ukuran usaha yang kecil membuat pelaku usaha tidak menggunakan pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar.
4. Kurangnya kemampuan pengelola UMKM dalam pengelolaan penganggaran.
5. Kurangnya kompetensi pemilik dalam pengelolaan usahanya sehingga menghambat pertumbuhan usaha.
6. Minimnya pengetahuan kompetensi dalam pengungkapan pembukuan laporan keuangan untuk menilai keandalan dari kualitas laporan keuangan.
7. Minimnya pengetahuan pemilik dalam memasarkan produk.
8. Pertumbuhan pendapatan usaha yang tidak stabil yang mengakibatkan kegagalan pada usaha kecil.
9. Karyawan yang bekerja pada UMKM tidak sesuai kompetensi sehingga memperlambat proses produksi dapat menyebabkan kinerja UMKM tidak optimal.
10. Minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro dalam menggali potensi masing-masing UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada variabel aspek keuangan, ukuran usaha dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating di bidang kuliner di Kecamatan Lubuk Begalung. Objek penelitian ini dibatasi pada pemilik UMKM dikecamatan Lubuk Begalung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?
2. Bagaimana pengaruh ukuran usaha terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?
4. Bagaimana pengaruh aspek keuangan, ukuran usaha, dan kompetensi secara bersama-sama terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?
5. Bagaimana pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja usaha mikro dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?

6. Bagaimana pengaruh ukuran usaha terhadap kinerja usaha mikro dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?
7. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja usaha mikro dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran usaha terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kompetensi sumber daya terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh aspek keuangan, ukuran usaha, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja usaha mikro dan menengah di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran usaha terhadap kinerja usaha mikro dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran usaha terhadap kinerja usaha mikro dan menengah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating di bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja usaha mikro dan menengah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating bidang kuliner Kecamatan Lubuk Begalung.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih dan beberapa manfaat bagi pihak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penelitian dan lainnya seperti :

1. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai aspek keuangan dan kompetensi SDM untuk meningkatkan kinerja bagi UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini mampu dijadikan bahan pertimbangan atau bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian lainya dalam bidang sejenis secara lebih komprehensif dan lebih mendalam

3. Bagi akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan pengaruh UMKM di bidang kuliner yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung.